

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Fenomena Arab Spring merupakan sebuah fenomena yang memunculkan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di negara-negara Afrika Utara dan Timur Tengah. Fenomena tersebut menyebabkan masyarakat berupaya untuk menggulingkan pemerintahan yang otokrasi agar berganti menjadi pemerintahan yang demokratis. Pada awalnya, fenomena Arab Spring muncul di Tunisia pada tahun 2010, kemudian fenomena tersebut menyebar luas ke berbagai negara-negara seperti Mesir, Aljazair, Maroko, Bahrain, Yordania, Libya, Libanon, Suriah, dan sebagainya (McKay, 2011).

Suriah menjadi salah satu negara yang terdampak fenomena Arab Spring. Gelombang fenomena tersebut muncul di Suriah pada Maret 2011 ditandai dengan adanya protes-protes untuk melakukan perubahan rezim oleh masyarakat. Hal tersebut merupakan cerminan dari ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan yang otokrasi dibawah Bashar Al Assad (Al-Saleh, 2013). Akan tetapi, protes-protes tersebut kemudian berubah menjadi konflik bersenjata yang dilakukan oleh kelompok oposisi yang kemudian bertransformasi menjadi Free Syrian Army (FSA) yang berupaya untuk menggulingkan pemerintahan Bashar Al Assad (Al-Saleh, 2013).

Selain konflik bersenjata yang dilakukan oleh kelompok oposisi terhadap pemerintahan Suriah, kemunculan Islamic State of Iraq and Sham (ISIS) pada tahun 2013 juga menjadikan permasalahan baru dalam konflik di Suriah karena ISIS memiliki ambisi untuk mendirikan negara berbasis kekhalifahan islam di Irak dan Suriah, serta rencananya akan diperluas ke seluruh wilayah-wilayah negara lain di sekitarnya (Wood, 2015). ISIS pun juga berhasil merebut kota Raqqa dari Suriah dan menjadikannya sebagai kota administratif pada saat itu juga (Al-Saleh, 2013).

Konflik yang terjadi di Suriah, baik konflik bersenjata maupun kemunculan ISIS, tentu saja menimbulkan banyak korban jiwa, baik dari penduduk sipil maupun non sipil. Setidaknya 195,545 jiwa meninggal akibat konflik yang terjadi di Suriah hingga Juni 2016 (Center for Documentation of Violations in Syria). Dengan banyaknya jumlah korban yang berjatuhan dalam konflik tersebut, kemudian membuat Sekjen PBB, Ban-Ki Moon, menyebut bahwa konflik yang terjadi di Suriah sudah termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan dan dijadikan sebagai krisis kemanusiaan terburuk yang pernah terjadi setelah Perang Dunia II (Al-Saleh, 2013).

Komunitas internasional pun memberikan perhatian kepada konflik yang terjadi di Suriah karena penggunaan senjata kimia sehingga menyebabkan banyak korban berjatuhan (Gaub dan Popescu, 2013). Kehadiran negara-negara seperti Amerika Serikat dan Rusia menjadikan konflik bersenjata ini dikategorikan sebagai konflik bersenjata internasional. Akan tetapi, keberpihakan kedua negara tersebut sangat berlawanan (Mrou, 2015). Amerika Serikat bersama aliansinya

mendukung diturunkannya Rezim Bashar Al Assad yang terlihat dalam dukungan penuhnya terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2254 yang salah satunya menyatakan untuk diadakan pemilihan umum yang bebas dan adil dibawah pengawasan PBB (www.bbc.com).

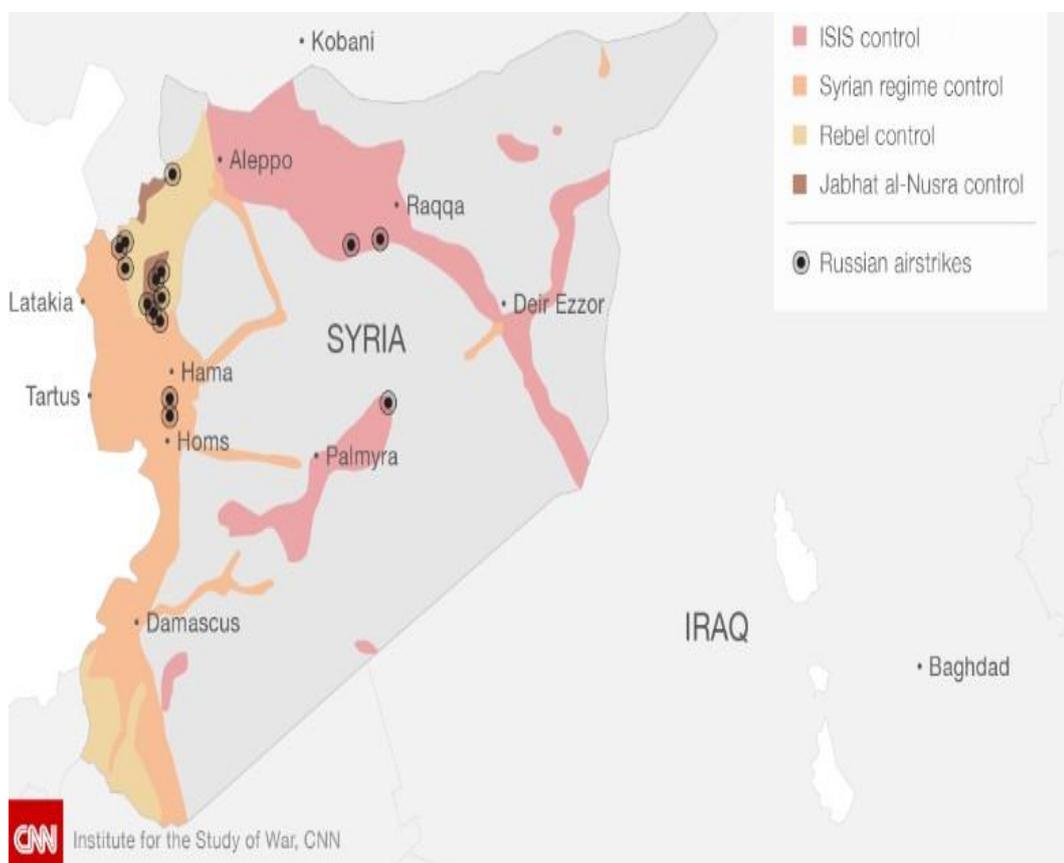
Di sisi lain, Rusia bersama dengan Iran justru sebaliknya, memberikan dukungannya agar Rezim Bashar Al Assad tetap dipertahankan. Hal tersebut terlihat dalam upaya-upaya yang ditunjukkan oleh kedua negara tersebut untuk terus mempertahankan Rezim Bashar Al Assad dengan berbagai macam cara. Bahkan Iran juga mengirimkan pasukan militernya yang disebut sebagai Al-Quds Force and Basij Militia ke Suriah untuk membela Rezim Bashar Al Assad dan mengamankan kepentingannya, yakni pengupayaan regional hegemoninya terhadap negara-negara Islam (Özemer, 2015).

Kedekatan Rusia dengan Suriah sudah dimulai sejak tahun 1971 saat Perang Dingin masih berlangsung (Gaub dan Popescu, 2013). Pada saat itu, Suriah dipimpin oleh Hafez Al Assad, ayah dari Bashar Al Assad. Suriah menjadi salah satu partner strategis yang penting bagi Rusia di wilayah Timur Tengah. Namun, setelah Perang Dunia usai, hubungan Rusia dan Suriah tidak lagi sekuat dulu ditandai dengan putusannya hubungan keamanan dan intelijensi antara kedua negara tersebut di era Yeltsin (Nizameddin, 2012). Kemudian pada tahun 2000-an ketika Rusia berada dibawah Vladimir Putin dan Suriah berada dibawah Bashar Al Assad, hubungan kedua negara kembali menguat ditunjukkan dengan penegasan Rusia sebagai posisinya dalam hubungan internasional terutama fokusnya terhadap Timur Tengah (Gaub dan Popescu, 2013).

Rusia sebagai salah satu negara yang menjadi *external player* dalam konflik yang terjadi di Suriah mulai melibatkan secara militer dalam Konflik Suriah pada September 2015 (Klein, 2015).

Gambar 1.1.

Pemetaan Kekuasaan di Suriah



Sumber: www.cnn.com 2015.

Diturunkannya militer Rusia ke Suriah dan serangan udara ke Suriah pun juga dianggap Amerika Serikat sebagai tindakan yang gegabah karena banyak dari target-target serangan tersebut mengarah pada kelompok oposisi yang mendapat

dukungan oleh Amerika Serikat (Yan dan Morgenstein, 2015). Namun, hal tersebut tidak menyurutkan keinginan Rusia untuk tetap melibatkan diri dalam Konflik Suriah dengan memihak Rezim Bashar Al Assad. Sebenarnya, sejak tahun 2011, Rusia memang sudah melakukan upaya-upayanya untuk melindungi Rezim Bashar Al Assad, namun tidak secara militer melainkan upaya-upaya diplomatis seperti mengeluarkan hak vetonya untuk Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2254.

Urgensi dari penelitian ini adalah keterlibatan Rusia dalam konflik bersenjata internasional di Suriah yang mana justru dinilai semakin memperkeruh situasi terutama terkait dengan banyaknya korban yang berasal dari masyarakat sipil dan penggunaan senjata kimia. Hal ini membuat Rusia dianggap oleh komunitas internasional mendukung aksi kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Suriah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti akan mencoba memberikan penjelasan mengenai alasan dan faktor-faktor yang menyebabkan Rusia begitu kokoh untuk melibatkan diri baik secara diplomatik maupun secara dalam konflik bersenjata internasional yang terjadi di Suriah dari tahun 2011 hingga 2016 walaupun keterlibatannya justru dianggap semakin memperkeruh situasi di Suriah.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian: “mengapa Rusia melibatkan diri baik dalam konflik bersenjata yang terjadi di Suriah tahun 2011 hingga 2015?”

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana keterlibatan Rusia di dalam konflik Suriah sejak tahun 2011-2015.
2. Untuk memberikan penjelasan dan pemahaman terkait alasan Rusia melibatkan diri dalam konflik Suriah tahun 2011-2015.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap disiplin Ilmu Hubungan Internasional mengenai alasan suatu negara melibatkan diri dalam konflik negara lain.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengambilan kebijakan luar negeri terkait keamanan dan kepentingan nasional suatu negara.

1.5. Kerangka Pemikiran

1.5.1. Pendekatan State – Centric

Penelitian ini menggunakan pendekatan *state – centric*. Pendekatan *state – centric* menjadikan negara sebagai unit analisis paling penting dalam hubungan internasional. Seperti yang dikemukakan oleh Stephen Bell dan Andrew Hindmoor dalam bukunya yang berjudul *Rethinking Governance: The Centrality of the State in Modern Society*, bahwa

“Our approach is state – centered because we argue that governments rely upon hierarchical authority to implement their policies, and because, even when governments choose to govern in alternative ways, state remains the pivotal player in establishing and operating governance strategies and partnership.” (Bell dan Hindmoor, 2009 : 3)

Negara merupakan aktor terpenting dalam mengimplementasikan kebijakan yang dibuatnya. Negara juga merupakan satu-satunya aktor yang paling signifikan dalam menentukan arah kebijakan terutama yang terkait dengan keamanan dan kepentingan nasional (Lake, 1999). Negara mempunyai strategi dan preferensi dalam menentukan kebijakan luar negeri yang ingin diambil. Dalam hal ini, Rusia memiliki strategi dan preferensi tersendiri untuk melibatkan diri dalam konflik bersenjata di Suriah yang kemudian mempengaruhi pola hubungannya dengan negara lain seperti Amerika Serikat dan sekutunya yang juga melibatkan diri dalam konflik tersebut.

1.5.2. Realisme

1.5.2.1. Paradigma Realisme

Penelitian ini akan menggunakan paradigma realisme. Paradigma realisme merupakan paradigma yang dominan dalam hubungan internasional. Paradigma realisme menggunakan negara sebagai unit analisa sebab negara merupakan aktor terpenting dalam hubungan internasional. Negara juga merupakan aktor yang paling utama yang bertanggung jawab terhadap keamanan nasionalnya sendiri. Realisme memandang bahwa ancaman terhadap keamanan suatu negara datang dapat berupa kompetisi dalam hal kapabilitas militer dan persaingan ekonomi.

Kondisi sistem internasional yang anarki dan tidak adanya otoritas tertinggi selain negara membuat negara harus bertindak *self-help* atau membantu diri sendiri dalam menjamin keamanan nasionalnya. Tindakan *self-help* bisa dalam bentuk seperti perimbangan kekuatan, intervensi, pertahanan nasional dan keamanan kolektif (Hsiung, 1997 : 49 – 51). Perilaku setiap negara juga ditentukan sebagaimana negara tersebut mempersepsikan suatu ancaman.

Negara akan cenderung berperang apabila ancaman tersebut secara jelas terkait dengan kepentingan nasionalnya. Perang tidak dapat dihindarkan bagi negara sebab pada dasarnya perang juga merupakan bagian dari sifat dasar manusia dan perang tidak dapat diatur ataupun dicegah melalui seperangkat aturan (Burke, 2008). Dan dunia juga tidak dapat terlepas dari perang dan kompetisi (Mearsheimer, 2001). Jadi fokus realisme adalah perilaku negara akan lebih banyak dikarenakan faktor-faktor eksternal tidak pada karakteristik internalnya.

Tidak ada negara yang dapat dikategorikan sebagai negara baik atau buruk karena perilaku negara ditentukan oleh bagaimana negara tersebut mempersepsikan dan mengkalkulasikan kekuatan yang harus dimilikinya.

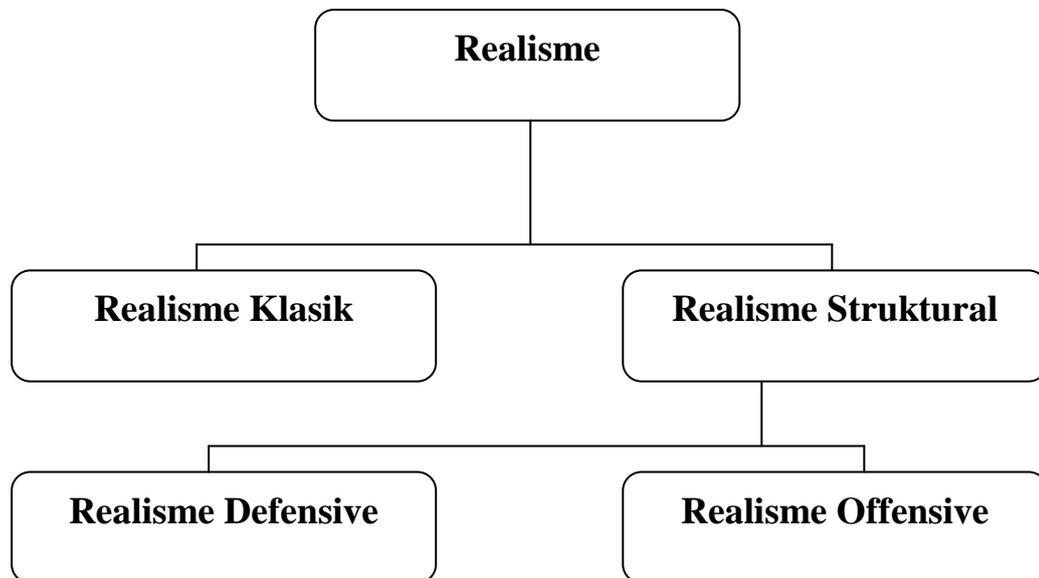
Sikap Rusia dalam keterlibatannya pada konflik bersenjata di Suriah tidak lain karena Rusia mempersepsikan adanya ancaman terhadap kepentingan nasionalnya di Suriah. Rusia dan Suriah memiliki kedekatan sejak tahun 1971 kemudian mengalami pasang-surut dan kembali membaik pada awal tahun dekade 2000. Rusia mempersepsikan Suriah sebagai *strategic partner* di wilayah Timur Tengah dan tentu saja ada banyak kepentingan nasional Rusia disana terkait upayanya sebagai *single influence* di Timur Tengah. Dengan kedatangan Amerika Serikat yang juga menjadi *external player* dalam konflik bersenjata di Suriah, Rusia tentu saja beranggapan bahwa hal tersebut akan menjadi ancaman bagi kepentingan nasionalnya. Apabila kepentingan nasionalnya benar-benar terganggu, maka hal tersebut akan berimplikasi pada keamanan nasionalnya.

1.5.2.2. Teori Offensive Realism – John J. Mearsheimer

Penelitian ini menggunakan kerangka teori *offensive realism* dari John J. Mearsheimer dimana kerangka ini lebih menekankan pada sistem internasional yang anarki cenderung mendorong negara untuk konfliktual. *Offensive realism* merupakan turunan dari realisme struktural.

Gambar 1.2.

Tipologi Realisme



Diolah dari: Feng & Ruizhang dalam Asrudin & Mirza Jaka Suryana “*Refleksi Teori Hubungan Internasional*” (2009 : 19)

Sama seperti turunan dari realisme struktural lain yakni *defensive realism* yang dicetuskan oleh Kenneth Waltz, teori *offensive realism* ini mengasumsikan bahwa sistem internasional yang anarki sangat mempengaruhi perilaku suatu negara. Bedanya, *offensive realism* ini lebih menekankan pada kapabilitas negara yang lebih *offensive* untuk menanggapi dunia yang penuh dengan ketidakpastian.

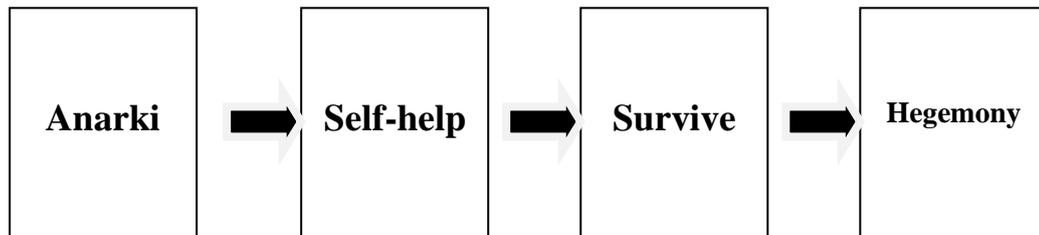
Bila *defensive realism* lebih berhati-hati dalam menanggapi suatu ancaman dengan cara meningkatkan kekuatan sesuai dengan seberapa besar ancaman tersebut atau *appropriate amount of power*, maka *offensive realism* justru sebaliknya. *Offensive realism* beranggapan bahwa sistem internasional yang penuh dengan ketidakpastian mendorong suatu negara untuk selalu meningkatkan

power karena hanya dengan cara itu lah suatu negara *survive* (Mearsheimer, 2001). Dalam teorinya, Mearsheimer juga mengemukakan bahwa faktor struktural seperti sistem internasional yang anarki karena ketiadaan otoritas tertinggi selain negara dan adanya distribusi *power* sangat mendorong bagaimana suatu negara akan berperilaku untuk menjamin kepentingan dan keamanan nasionalnya.

Offensive realism mengasumsikan bahwa sistem internasional yang anarki mendorong negara-negara untuk cenderung dapat memaksimalkan kekuatan dan mengambil kebijakan-kebijakan yang bersifat agresif (Feng dan Rizhuang, 2009 : 33). Kondisi anarki ini lah yang menyebabkan negara bersifat revisionis (Mearsheimer, 2001). Revisionis yang dimaksud adalah kondisi dimana negara-negara akan selalu memantau aktivitas satu sama lain dan meningkatkan kekuatannya dalam komunitas internasional. Hal ini membuat kondisi *status quo* sulit untuk diterapkan dalam sistem internasional yang bersifat anarki tersebut (Mearsheimer, 2001). Implikasi dari adanya sifat revisionis dalam sistem internasional yang anarki tersebut adalah dimana great power akan dilempari tanggung jawab untuk menjaga stabilitas internasional atau buck-passing (Feng dan Rizhuang, 2009 : 34).

Suatu negara harus bersikap *offensive* untuk tetap *survive*. Salah satunya dengan memiliki kekuatan yang besar. Dan upaya untuk meningkatkan kekuatan hanya akan berhenti apabila negara tersebut telah mencapai hegemon.

Gambar 1.3.

Asumsi *Offensive Realism*

Diolah dari: John J. Mearsheimer “*The Tragedy of Great Power Politics*” (2001)

Dalam kerangka ini, *great power* bukanlah *mindless aggressor*, melainkan aktor rasional yang berusaha untuk meningkatkan kekuatan dengan asumsi bahwa dengan semakin besar kekuatan yang dimiliki maka ia akan mendapat dua kemungkinan. Pertama, negara tersebut tidak akan rentan terhadap ancaman yang datang dari negara-negara lain. Kedua, negara tersebut akan berpotensi menjadi hegemon tunggal (Mearsheimer, 2001).

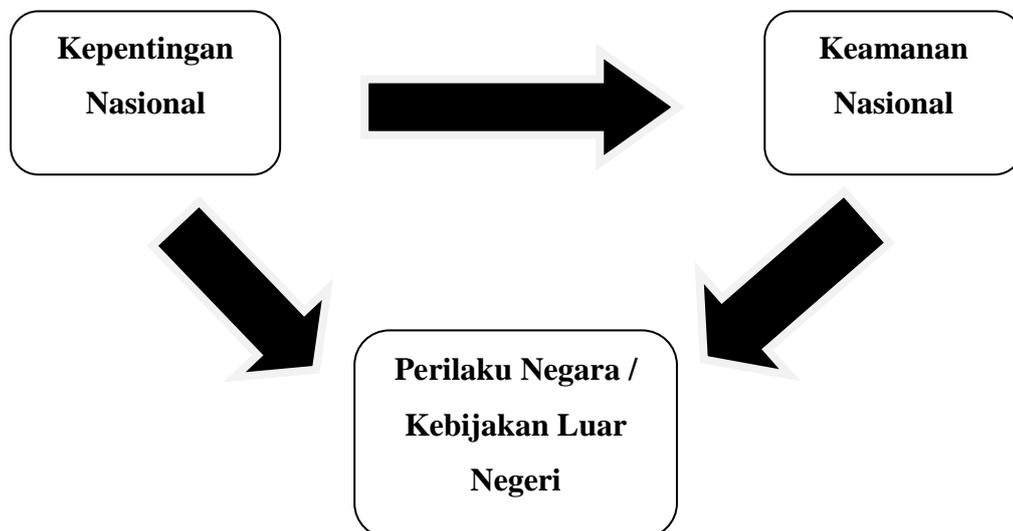
Mearsheimer menegaskan, meskipun menjadi hegemon peluangnya sangat kecil, setidaknya suatu negara dapat menjadi hegemon di regionalnya dan negara-negara di sekitarnya serta mendapatkan akses untuk menyebarkan pengaruh ke wilayah regional lain. Sebagai aktor yang rasional dalam *offensive realism*, negara telah terlebih dahulu mempertimbangkan keuntungan yang akan diperoleh, apakah lebih besar atau tidak. Tidak mungkin bila sebuah negara mengambil sebuah kebijakan luar negeri secara *offensive* tanpa mempertimbangkan untung dan rugi. Negara juga harus mempertimbangkan kapasitas mereka untuk meningkatkan power itu mampu atau tidak. *Offensive realism* percaya bahwa

sistem internasional mendorong negara-negara untuk meningkatkan power dan *take advantage* selama *benefit* lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan dan cara tersebut merupakan cara terbaik untuk menjamin keamanan nasional negara itu sendiri.

Suatu negara akan selalu mengamankan kepentingan nasionalnya dari segala ancaman. Sebab, kepentingan nasional mempunyai implikasi terhadap keamanan nasional negara tersebut. Hal tersebut akan mempengaruhi perilaku negara yang akan direfleksikan dalam suatu kebijakan luar negeri untuk melindungi kepentingan dan keamanan nasional negaranya.

Gambar 1.4.

Tipologi Perilaku Negara



Diolah dari: John J. Mearsheimer, *“The Tragedy of Great Power Politics”* (2001)

Bagan diatas menjelaskan bagaimana perilaku negara yang dapat dilihat dari kebijakan luar negerinya merupakan cerminan dari kepentingan nasional dan keamanan nasionalnya. Suatu negara hanya akan bertahan untuk menjamin keamanan nasionalnya. Sedangkan keamanan nasional terjadi apabila kepentingan nasionalnya juga dalam keadaan aman. Sehingga, suatu negara dapat merumuskan kebijakan luar negeri yang sangat *offensive* apabila negara tersebut mempersepsikan adanya ancaman dari ketidakpastian struktural.

Selain itu, sistem internasional yang anarki membuat suatu negara cenderung melakukan tindakan ekspansi (Feng dan Rizhuang, 2009 : 35). Faktor geografis merupakan salah satu komponen penting bagi *great power* untuk memaksimalkan kekuatan yang dimiliki. Hal ini berkaitan dengan pengaruh yang dapat ditularkan *great power* kepada negara-negara lain (Ray, 1990 : 215). Pengaruh tersebut berimplikasi pada pembuatan kebijakan yang serupa antara *great power* dan sekutunya. Keuntungannya adalah *great power* dapat memanfaatkan kesepahaman tersebut untuk membuat sekutunya seolah menggantungkan urusan negaranya kepada *great power*. Semakin luas regional yang dikuasai, maka akan semakin mudah bagi *great power* untuk menjadi hegemon.

Kaitannya dengan studi kasus dalam penelitian ini adalah sebagaimana *great power* pada umumnya, Rusia tidak akan pernah dapat memastikan ambisi dari negara *great power* lain. Rusia memutuskan untuk melibatkan diri dalam konflik bersenjata di Suriah juga tidak lepas dari kedatangan Amerika Serikat dalam konflik tersebut. Terlebih lagi, kedatangan Amerika Serikat secara jelas

untuk mendukung kelompok oposisi yang menentang rezim Bashar Al Assad, rezim yang didukung Rusia. Rusia dan Suriah memiliki hubungan yang sangat dekat. Rusia menjadikan Suriah sebagai *strategic partner* untuk mendapatkan akses dan menancapkan pengaruhnya di regional Timur Tengah. Apabila kelompok oposisi berhasil mengambil alih Suriah dengan bantuan Amerika Serikat, secara logika, Rusia akan kehilangan akses dan pengaruhnya di Timur Tengah.

Perilaku Rusia dalam keterlibatannya dalam konflik Suriah bukan berarti semata-mata untuk menghalau kemungkinan kemenangan Amerika Serikat, melainkan juga sebagai langkah *offensive* untuk meningkatkan kekuatan karena Rusia tidak akan pernah tahu kepentingan apa yang dibawa Amerika Serikat dalam konflik tersebut. Amerika Serikat juga merupakan *great power* dan dalam sistem internasional yang anarki, Great Power memiliki kemungkinan kapabilitas militer yang *offensive*. Sehingga, keterlibatan Rusia dalam konflik Suriah juga dikarenakan dorongan untuk bertahan dan meningkatkan kekuatan yang dimiliki untuk mencapai keamanan nasionalnya.

1.6. Metode Penelitian

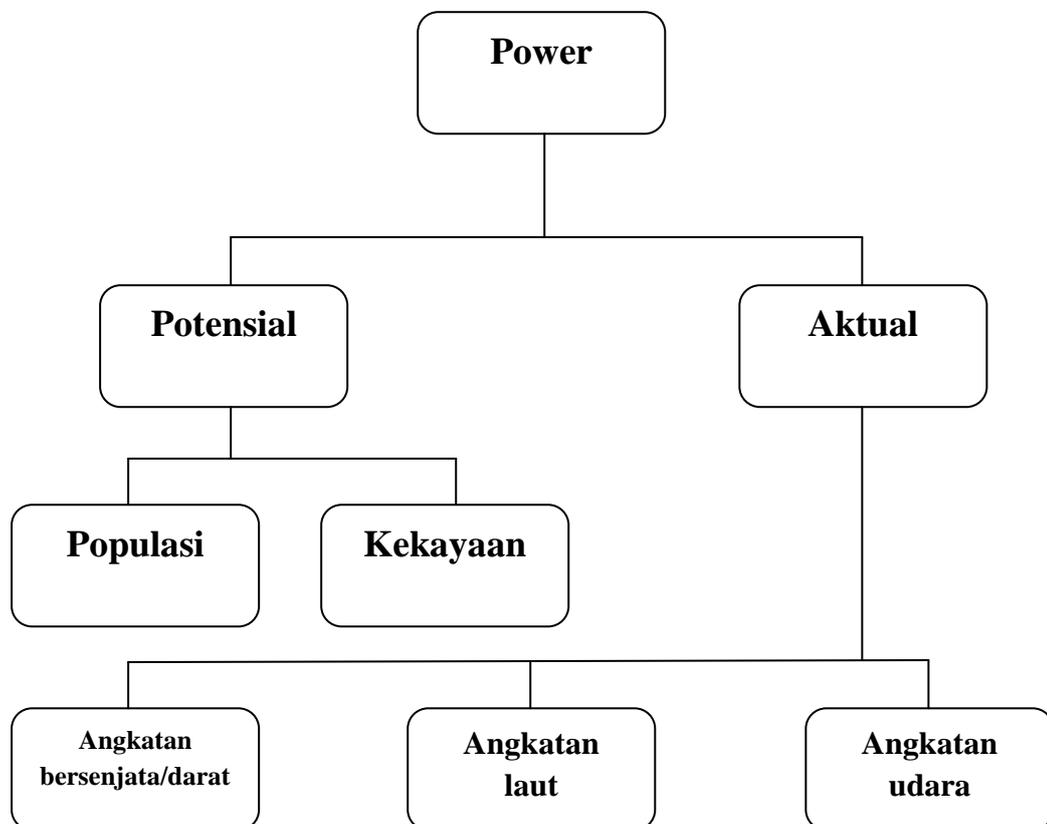
1.6.1. Definisi Konseptual

1.6.1.1. *Great Power*

Definisi *great power* dalam penelitian ini merujuk pada definisi *great power* oleh John J. Mearsheimer dalam bukunya “*The Tragedy of Great Power Politics*”. Sebelumnya, Mearsheimer mengemukakan pengertian mengenai *power*. Dalam penelitian ini akan dijelaskan pengertian *power* menurut Mearsheimer melalui tipologi sebagai berikut:

Gambar 1.5.

Tipologi *Power* menurut Mearsheimer



Dalam bagan tersebut tertulis apa saja yang menjadi komponen *power* suatu negara. Akan tetapi, Mearsheimer lebih menekankan pada signifikansi *power* aktual. Sebab, *power* aktual terdiri dari komponen militer suatu negara yang paling penting untuk menaklukkan dan atau mengontrol wilayah.

Di samping itu, *power* potensial hanya sebagai *building-blocks* dari *power* aktual. Keberadaannya memang penting, namun tidak lebih penting dari keberadaan *power* aktual. Secara tersirat, Mearsheimer mengklasifikasikan negara sebagai *great power* atau tidak tergantung pada seberapa banyak dan kuat komponen-komponen *power* yang ada di negara tersebut. Untuk mengetahui seberapa besar kekuatan negara agar dapat diklasifikasikan sebagai *great power* maka sangat bergantung pada komponen *power* negara-negara lain sebagai obyek pembandingan.

Kemudian, secara tersirat mengemukakan bahwa pengertian dari *great power* adalah negara-negara yang melakukan upaya untuk bertahan dengan cara meningkatkan kekuatan yang dimilikinya untuk mencapai keamanan. Hal ini dikarenakan mampu atau tidaknya suatu negara untuk bertahan dalam dunia yang mengharuskan dirinya menolong dirinya sendiri, sangat bergantung pada seberapa besar kekuatan yang dimiliki negara tersebut. Semakin besar kekuatan yang dimiliki, maka kemungkinan untuk dapat bertahan juga semakin besar.

Negara-negara tersebut tidak pernah menghitung berapa banyak kekuatan yang ingin mereka miliki. Mereka akan cenderung selalu meningkatkan kekuatan apabila mereka belum mencapai hegemoni. Meskipun menurut Mearsheimer kecil

kemungkinan negara untuk mencapai hegemoni, setidaknya negara yang dikatakan sebagai *great power* harus mampu mempunyai kapabilitas militer yang kuat dan mempunyai pengaruh di wilayah lain.

Great power cenderung bersikap *offensive* karena sebenarnya *great power* lebih takut pada *great power* lain karena mereka sistem internasional yang anarki sangat tidak memberikan jaminan terhadap keamanan nasional negaranya dari ambisi negara lain. *Great power* bertindak lebih agresif karena mereka merasa mempunyai kapabilitas militer yang mumpuni. *Great power* bukan *mindless aggressor* tetapi mereka adalah negara yang sebelum bertindak *offensive* telah mempertimbangkan untung dan rugi dan bagaimana negara lain akan bereaksi terhadapnya. Bila keuntungan tidak sebanding dengan upaya yang dilakukan, maka negara *great power* tidak akan bertindak agresif.

Jadi, *great power* adalah negara yang kekuatannya bertumpu pada kekuatan aktual yang diukur dari segi kemiliteran baik dari kualitas maupun kuantitas pasukan maupun persenjataannya. Sifat dari *great power* cenderung *offensive* namun untuk dapat tetap bertahan dalam sistem internasional yang anarki, *great power* pun juga akan bersikap rasional dengan tetap mempertimbangkan jumlah keuntungan dan kemungkinan kerugian dalam setiap tindakan atau perilaku atau kebijakannya.

1.6.1.2. Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional merupakan sebuah konsep yang pada umumnya akan berimplikasi pada kebijakan suatu negara. Kepentingan nasional dapat

menjelaskan perilaku politik luar negeri suatu negara yang secara sistematis dirumuskan melalui strategi diplomasi (Sitepu, 2011 : 163). Kepentingan nasional juga sangat erat hubungannya dengan *power* dan *survival* suatu negara (Morgenthau, 1965 : 13). Hal tersebut dikarenakan kepentingan nasional merupakan suatu kepentingan yang sudah tidak dapat ditawar-tawar lagi sebab kepentingan nasional erat kaitannya dengan keamanan negara.

“...perennial standard by which political action must be judged and directed because the objective of foreign policy must be defined in terms of the national interest” (Morgenthau, 1965 : 243)

Kepentingan nasional merupakan wujud dari obyektivitas kebijakan luar negeri suatu negara yang harus dicapai dengan cara apapun karena dengan mencapai dan mempertahankan kepentingan nasional, hal tersebut sangat berimplikasi pada negara akan bertahan dan meningkatkan *power*.

Jadi, kepentingan nasional adalah refleksi dari obyektifitas kebijakan luar negeri suatu negara yang berkaitan erat dengan *power* dan *survival* sehingga sifatnya sudah tidak dapat ditawar-tawar lagi.

1.6.1.3. Keamanan Nasional

Aman adalah suatu kondisi dimana tidak ada ancaman. Keamanan nasional merupakan suatu konsepsi yang berkaitan erat dengan kepentingan nasional. Semakin banyak kepentingan nasional yang tercapai, maka negara akan semakin aman. Keamanan nasional tercapai apabila suatu negara tidak lagi mendapatkan ancaman. Keamanan nasional merupakan suatu kesatuan integritas teritorial dan institusinya dan sifatnya sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi

sehingga penting sekali untuk dipertahankan tanpa kompromi (Morgenthau, 1965).

Jadi, keamanan nasional adalah harga mati suatu negara yang sifatnya mutlak karena keamanan nasional merupakan jaminan bagi kelangsungan hidup bangsa dan kesatuan integritas teritorial negara.

1.6.1.4. Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri dirumuskan dengan beberapa tujuan. Pertama, kebijakan luar negeri diasumsikan sebagai obyektivitas penting atau inti dasar dari suatu negara dan sifatnya tidak dapat ditawar-tawar lagi. Kedua, kebijakan luar negeri dengan jangka menengah yang biasanya diasumsikan sebagai kebijakan terhadap suatu kepentingan yang sifatnya tidak terlalu mendesak, namun juga tidak dapat diabaikan dan batasan waktunya biasanya dalam jangka menengah. Ketiga, kebijakan luar negeri dengan jangka waktu panjang yang biasanya akan dilakukan ketika dua kebijakan sebelumnya telah terlampaui karena kebijakan ini tidak memiliki batasan waktu (Holsti, 1977 : 142 – 148).

Kebijakan luar negeri adalah kebijakan suatu negara yang merefleksikan perilaku negara sebagaimana negara tersebut mempersepsikan kepentingan dan keamanan nasionalnya. Kebijakan luar negeri merupakan kebijakan atau sikap politik suatu negara terhadap negara lain guna mencapai kepentingan nasionalnya (Sitepu, 2011 : 153). Di samping itu, kebijakan luar negeri suatu negara juga dapat bertujuan untuk menjamin keamanan dari negara tersebut. Jadi, kebijakan luar negeri adalah hubungan atau perilaku suatu negara terhadap negara-negara lain

yang erat kaitannya dengan keberlangsungan kepentingan dan keamanan nasionalnya. Sifat dari kebijakan luar negeri bisa mendesak, jangka menengah, dan jangka panjang.

1.6.1.5. Konflik Bersenjata Internasional

Yang dimaksud sebagai konflik bersenjata pada dasarnya adalah suatu konflik internal wilayah suatu negara antara dua atau lebih kelompok yang terorganisir dengan menggunakan senjata (Verhoeven, 2007). Lebih luas, konflik bersenjata tersebut dapat dikatakan terinternasionalisasi apabila ada dukungan atau keterlibatan aktor-aktor lain di luar batas wilayah negara tersebut. Aktor-aktor tersebut bisa aktor negara maupun aktor non-negara.

Menurut ICRC, konflik bersenjata internasional mempunyai beberapa kategori yang menyebabkan ia terinternasionalisasi. Pertama, negara ketiga atau negara yang mengintervensi memberikan bentuk dukungannya terhadap konflik internal suatu negara dengan cara memasok persenjataan. Kedua, negara ketiga tersebut mengintervensi dengan cara mendukung kelompok bersenjata terorganisir yang ada di wilayah suatu negara. Ketiga, merupakan kombinasi dari kedua kategori di atas.

Jadi, konflik bersenjata internasional adalah konflik bersenjata suatu negara yang bisa jadi melibatkan pemerintah dengan kelompok bersenjata terorganisir atau kelompok bersenjata terorganisir dengan kelompok bersenjata terorganisir. Namun, konflik ini kemudian terinternasionalisasi dengan adanya intervensi negara-negara lain yang bisa jadi negara-negara tersebut memberi

pasokan senjata kepada pihak-pihak yang berkonflik, maupun dengan terang-terangan memberi dukungan secara militer kepada pihak-pihak yang berkonflik.

1.6.2. Operasionalisasi Konsep

1.6.2.1. *Great power*

Great power yang dimaksud dalam penelitian ini adalah negara yang:

- a) Mempunyai kekuatan militer yang secara kualitas dan kuantitas unggul baik dalam jumlah pasukan maupun persenjataannya.
- b) Mempunyai kekuatan tersebut cenderung *offensive*.
- c) Bersifat rasional dalam mempertimbangkan kemungkinan keuntungan dan kerugian tindakannya.

Jadi, *great power* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kekuatan militer Rusia yang secara kualitas dan kuantitas unggul dan bersifat *offensive* terkait dengan jumlah serangan yang diluncurkan dalam keterlibatannya di konflik yang terjadi di Suriah.

1.6.2.2. Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah:

- a) Kepentingan nasional sebagai tujuan yang ingin dicapai dalam hubungan luar negeri.

- b) Kepentingan tersebut dicapai dengan berbagai cara.
- c) Dikaitkan dengan upaya pemerintah untuk memperoleh, meningkatkan, dan mempertahankan *power* serta *survival*.
- d) Kepentingan nasional ini sifatnya tidak dapat ditawar-tawar lagi.

Jadi, kepentingan nasional dalam penelitian ini adalah kepentingan-kepentingan Rusia yang memotivasi Rusia untuk melibatkan diri dalam konflik yang terjadi di Suriah dan kepentingan tersebut sifatnya tidak dapat ditawar-tawar lagi karena bisa jadi berkaitan dengan *power* dan *survival*.

1.6.2.3. Keamanan Nasional

Keamanan nasional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah:

- a) Kondisi dimana tidak ada ancaman.
- b) Berkaitan dengan integritas teritorial dan institusi.
- c) Tidak dapat dikompromikan dalam pencapaiannya.

Jadi, keamanan nasional dalam penelitian ini tersebut keamanan nasional Rusia yang berkaitan dengan integritas teritorial dan institusi yang bisa jadi disebabkan karena vulnerabilitas di wilayah *strategic partner*-nya yakni Suriah, yang dapat berimplikasi pada keamanannya.

1.6.2.4. Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri yang dimaksud dalam penelitian ini adalah:

- a) Perilaku suatu negara terhadap negara-negara lain.
- b) Berkaitan dengan keberlangsungan kepentingan dan keamanan nasional.
- c) Kebijakan tersebut dapat berjangka pendek, menengah, dan panjang.

Jadi, kebijakan luar negeri dalam penelitian ini merupakan kebijakan luar negeri Rusia yang dimanifestasikan dalam keterlibatannya dalam konflik yang terjadi Suriah selama tahun 2011-2015 baik kebijakan tersebut termasuk dalam kebijakan inti, kebijakan jangka menengah maupun kebijakan jangka panjang Rusia terkait kepentingannya di Suriah.

1.6.2.5. Konflik Bersenjata Internasional

Konflik bersenjata internasional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah:

- a) Konflik bersenjata yang terjadi di suatu wilayah negara.
- b) Melibatkan pemerintah dengan kelompok bersenjata terorganisir atau antar kelompok bersenjata terorganisir.
- c) Muncul intervensi asing dalam konflik bersenjata tersebut.
- d) Intervensi asing tersebut dapat berupa dukungan militer pada pihak yang berkonflik.

Jadi, konflik bersenjata internasional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah konflik bersenjata yang terjadi di Suriah sejak tahun 2011 antara Free Syrian Army yang melawan rezim pemerintahan Bashar Al Assad dan ISIS serta Jabhat

Al Nusra yang kemudian diintervensi oleh kekuatan-kekuatan asing seperti Rusia dan Amerika Serikat dengan bentuk dukungan berupa persenjataan dan pasukan militer.

1.6.3. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah eksplanatif. Di dalam penelitian ini, penulis akan mencoba menjelaskan alasan Rusia melibatkan diri dalam konflik yang terjadi di Suriah 2011-2015 berdasarkan teori dan konsep-konsep yang telah dipaparkan dan menerapkannya pada data-data yang akan dikumpulkan.

1.6.4. Jangkauan Penelitian

Jangkauan waktu dari penelitian ini adalah pada April 2011 dimana pemberontakan yang menjadi cikal bakal dari perang sipil di Suriah terjadi hingga akhir tahun 2015 dimana Rusia yang awalnya melibatkan diri secara diplomatik dengan memveto resolusi PBB hingga kemudian menurunkan pasukan militernya untuk melakukan intervensi September 2015.

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi pustaka atau *library research*. Peneliti mencari data-data melalui studi kepustakaan atau literatur yang diambil meliputi buku, *e-journal*, *e-book*, jurnal internasional, dan juga berita-berita yang ada di media massa seperti internet atau koran.

1.6.6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang akan dilakukan adalah teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data kualitatif tidak membutuhkan bukti logika matematis dan statistik sehingga untuk memahami suatu peristiwa, maka diperlukan bahan-bahan yang diperlukan berupa pembicaraan yang sebenarnya, isyarat, ataupun tindakan sosial (Mulyana, 2003). Metodologi kualitatif membutuhkan perencanaan agar proses pengumpulan data dapat dilakukan secara sistematis. Metodologi kualitatif mengamati fenomena subyek penelitian baik berupa perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya yang kemudian didiskripsikan dalam kata-kata baik secara lisan maupun tertulis. Teknik analisis data kualitatif juga mempunyai batasan sehingga penelitian tidak meneliti di luar fokus (Moloeng, 2007 : 140).

Ada beberapa tahapan yang dapat metodologi penelitian seperti yang dikutip dari McDrury oleh Moloeng antara lain:

- a. Mempelajari data dengan seksama dan mengambil kata-kata kunci dan gagasan pokok.
- b. Menafsirkan kata-kata kunci dan gagasan pokok tersebut dan menerjemahkannya dalam bentuk kata-kata logis.

Kemudian disampaikan kembali oleh Moloeng (2007 : 163 – 170) melalui penjelasan teknik analisa seperti:

- a. Melakukan reduksi data dengan memfokuskan pada hal-hal yang bersifat penting.
- b. Melakukan kategorasi dengan menyusun data yang telah diperoleh.
- c. Melakukan sintesisasi dengan mengaitkan dalam kategori-kategori yan telah sesuai dengan data yang diperlukan.
- d. Melakukan penyajian data.
- e. Melakukan analisis data.
- f. Menarik kesimpulan dan verifikasi.

Peneliti diharuskan berusaha bersikap obyektif dengan tetap mengamati situasi obyek penelitian. Setelah data terkumpul, kemudian selanjutnya adalah proses verifikasi dimana peneliti mereduksi informasi-informasi mana yang berkaitan dan tidak berkaitan dengan obyek penelitian dan merumuskan dalam bentuk tulisan.

1.6.7. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari empat bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, landasan teori, dan metode penelitian yang terdiri dari definisi konseptual, operasionalisasi konsep, tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab II memberikan gambaran dan penjelasan tentang konflik yang terjadi di Suriah dan keterlibatan Rusia dari tahun 2011 – 2015.

Bab III memberikan analisis mengenai keterlibatan Rusia dalam konflik yang terjadi di Suriah pada tahun 2011 – 2015.

Bab IV akan menjadi bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.